

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, bahwa terdapat sejumlah hambatan yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, ketika berpartisipasi terhadap Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) di bidang pembangunan infrastruktur pada kegiatan pembangunan kantor RW. Berikut penjelasan lebih spesifik terkait hambatan partisipasi masyarakat pada program PIPPK dapat dibuktikan dari hasil analisis dengan menggunakan dimensi *can do*, *like to*, *enabled to*, *asked to*, dan *responded to* sebagai berikut;

Pada dimensi *can do* hambatan yang dialami oleh partisipan ketika berpartisipasi yaitu terkait informasi yang tidak merata kepada masyarakat mengakibatkan kurang mengertinya partisipan tentang konsep program dan keterlibatan partisipasi. Hal ini mengakibatkan kontribusi masyarakat yang rendah untuk ikut terlibat dalam kegiatan program, selain itu terdapat keterbatasan finansial yang dimiliki oleh partisipan untuk menyumbangkan untuk kebutuhan program. Hal ini diakibatkan karena partisipan tidak mempunyai penghasilan tetap dan adanya anggapan bahwa program sudah ada anggarannya. Maka pada dimensi “*can do*” masyarakat di Kelurahan Cibuntu

terkendala dalam menyumbangkan dalam bentuk uang yang dibutuhkan pada kegiatan pembangunan Kantor RW yang sekaligus gedung serbaguna.

Kemudian pada dimensi *can do, like to* dan *asked to*, memiliki permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Terdapat indikasi bahwa masyarakat di Kelurahan Cibuntu RW 07 melakukan partisipasi berdasarkan penunjukan masyarakat yang dilakukan oleh ketua RW sebagai partisipan, masyarakat yang ditunjuk sebagai partisipan adalah masyarakat asli yang berdekatan dengan lokasi program, masyarakat pendatang tidak dilibatkan sehingga tidak mengetahui program PIPPK, keterbatasan pelibatan seluruh masyarakat pada program. Hal ini berdampak juga pada jumlah partisipan yang terlibat, kemudian terkait dengan hambatan yang dialami partisipan. Terkait komitmen dan rasa ketertarikan program yaitu partisipan merasa bosan untuk mengikuti kegiatan pembangunan seperti pembangunan kantor RW dan pembangunan fasilitas publik lainnya dikarenakan program yang dilaksanakan setiap tahunnya kegiatannya hanya itu saja, kurang inovasi, hal ini yang mengakibatkan masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi sehingga kurangnya komitmen dan rasa ketertarikan masyarakat terhadap program karena adanya keterbatasan informasi yang diperoleh.

Lalu, pada dimensi *Enabled to* terdapat permasalahan yang dialami partisipan pada tahap perencanaan akses partisipan dalam menyampaikan aspirasi hanya ditampung saja, hanya ketua RW yang bisa mengambil keputusan kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan dikarenakan Ketua RW yang mempunyai jangkauan yang luas daripada masyarakat dan orang yang langsung berhubungan dengan pihak kelurahan,

kemudian terkait pelaksanaan program kendala yang dialami partisipan hambatannya terkait persoalan komunikasi tentang kekurangan bahan dilapangan, karena perwakilan dari kelurahan tidak selalu ada di lokasi kegiatan program terkait proses komunikasi antara partisipan dan pemerintah yang lamban.

*Responded to* hambatan partisipasi yang dialami partisipan saat diadakanya kegiatan rembug warga dalam penyampaian ide dan gagasan kurang ditanggapi karena masyarakat tidak mempunyai wewenang lebih untuk menentukan kegiatan pembangunan dan juga aspirasi masyarakat hanya di tampung saja kecil kemungkinan untuk direalisasikan, kemudian permasalahan dalam tahap pelaksanaan program, bahwa dari pihak kelurahan sulit dihubungi dan kurang cepat tanggap, jika ada kekurangan bahan material dilapangan, karena pihak kelurahan juga mempunyai urusan lain. Ide dan gagasan dari kelurahan cenderung rendah dalam menanggapi keluhan partisipan

## **6.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan peneliti yang diharapkan dapat menyelesaikan hambatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan program PIPPK adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Proses Perencanaan yang Lebih Partisipatif

Pada tahap perencanaanya penyampain informasi harus menyeluruh kepada masyarakat yang berada di lingkungan lokasi kegiatan musyawarah atau rembug warga

harus dijelaskan secara sederhana agar masyarakat mengerti mengenai keterlibatan masyarakat dan manfaat dari kegiatan PIPPK. Rembug warga harus dilaksanakan di tingkat Kelurahan agar keputusan yang dibuat dari hasil rembug warga berdasarkan kepentingan masyarakat dan juga tidak ada pembatas antara warga asli dan warga pendatang dalam hal ini pentingnya peran berbagai stakeholder pelaksana program seperti, Pihak Kelurahan, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat untuk saling berkordinasi bersama.

## 2. Meningkatkan Inovasi Program

Kegiatan pembangunan infrastruktur harus ada perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh Ketua RW dan Kelurahan agar dapat menarik masyarakat untuk mengikuti kegiatan PIPPK. Mengkaji ulang komitmen yang harus ada dalam setiap kegiatan dengan melibatkan masyarakat, agar terjadinya kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 3. Mengubah Tipe Rancangan Program

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan program PIPPK terdapat dua tipe rancangan program, rancangan program tipe swakelola I peran masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan saja yang dilaksanakan oleh Kelurahan Cibuntu sedangkan pada rancangan program tipe IV lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat secara keseluruhan untuk mengikuti semua tahapan pada program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Perubahan rancangan program tipe IV harus dilakukan agar masyarakat memiliki peran

lebih dan merasa dari bagian program sehingga terbentuknya kelompok masyarakat yang mampu berkolaborasi langsung dengan pemerintah daerah. Penerapan tipe IV rancangan program secara langsung menimbulkan transparansi dan akuntabilitas program yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah dan terpenuhinya asas-asas partisipasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative and Quantitative*, Los Angeles: Sage Publications.
- D Agus Bambang, Silalahi Ulber. 2017. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Administrasi Publik, Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Unpar Press.
- Denzin dan Lincoln, Diah Arundina, Silalahi Ulber. 2017. *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Unpar Press.
- Dye Thomas R. 2014. *Understanding Public Policy* <sup>15th</sup> Edition. New York : Pearson Education.
- Government of Ontario. 2010. *Program and Service Definition*. Ontario: *Queens Printer for Ontario*.
- Silalahi Ulber dkk. 2017. *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Unpar Press

## **Jurnal**

Amitai, Etzioni, Henry. 2006. *The Spirit of Community*. London : Fontana.

Bradburry, Tsang Stephen dkk. 2009. *Trust, Public Participation and Enviromental Governance in Hong Kong*. Hongkong: Environmental Policy.

Feictner Isabel dkk, Pereira Barbosa. 2019. *Human Rights in the Extractive Industries, transparency participation and resistance*.

Jerman: Springer International Publishing.

Idil, A. 2018. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan*. Bandung : Jurnal Reformasi Administrasi Vol. 5.

Langbein, L. 2006. *Public Public Program Evalution A Statistical Guide*. New York : M.E Sharpe Amonk.

Lowndes Et al. 2006. *Diagnosing and Remedying the failing of official Participation Scheme, The CLEAR Framework*. United Kingdom : Cambridge University Press.

Mannarini Terri dkk. 2009. *Public Involvement, How to Encourage Citizen Participation*. Italy: Journal of Community & Applied Social Psychology.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknik

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

### **Sumber Internet**

Andryan. *Kecamatan Sukajadi Bandung Kulon Babakan Ciparay dan Lengkong*

*dianugerahi PIPPK Awards*. Bandung : Humas Kota Bandung.

<https://humas.bandung.go.id/berita/kecamatan-sukajadi-bandung-kulon-babakan-ciparay-> diakses pada 16 Maret 2021.

Prokopim. 2018. *Pola Swakelola akan Lebih Memberdayakan Masyarakat*. Kota

Bandung: Humas.go.id. [https://humas.bandung.go.id/berita/pola-](https://humas.bandung.go.id/berita/pola-swakelola-akan-lebih-memberdayakan-masyarakat)

[swakelola-akan-lebih-memberdayakan-masyarakat](https://humas.bandung.go.id/berita/pola-swakelola-akan-lebih-memberdayakan-masyarakat) diakses pada 16 Maret 2021.